



Evaluasi Penerapan Akuntansi Manajemen Lingkungan dalam Pengelolaan Program Kerja pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bangkalan

Ruri Istia Damayanti*, Titiek Rachmawati

Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Email: ruriistiadamay@gmail.com*, titiekrachmawati@untag-sby.ac.id

Abstract. *This study aims to evaluate the application of environmental management accounting in the management of work programs at the Bangkalan Regency Environmental Agency. The research is motivated by increasing environmental problems, particularly waste volume and limited management facilities, while environmental management accounting has the potential to assist agencies in identifying, measuring, and reporting environmental costs as a basis for decision-making and public accountability. This study used a qualitative method with a case study approach at the Bangkalan Regency Environmental Agency. Data were collected through interviews, observations, and documentation studies. The results show that the Environmental Agency has implemented environmental management accounting, but its recording is still manual and does not separate environmental costs from general operational costs. This condition complicates cost evaluation and program impact assessment. Work program management has been structured and evaluated regularly, but performance measurement still focuses on output, not long-term environmental impact. Information transparency is also still limited to activity publications. Overall, the application of environmental accounting is at a basic stage and has not been fully integrated into the work program planning and evaluation process. The findings of this study provide theoretical and practical implications in the form of strengthening understanding of the role of environmental management accounting and the need to improve the work program recording and evaluation system at the Bangkalan Regency Environmental Agency.*

Keywords: *Environmental Management Accounting, Work Program Management, Environmental Performance, Transparency, Bangkalan Regency Environmental Agency.*

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi penerapan akuntansi manajemen lingkungan dalam pengelolaan program kerja pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bangkalan. Penelitian di latar belakang dari meningkatnya permasalahan lingkungan, terutama volume sampah dan keterbatasan sarana pengelolaan, sementara akuntansi manajemen lingkungan berpotensi membantu instansi dalam mengenali, mengukur dan melaporkan biaya lingkungan sebagai dasar pengambilan keputusan dan pertanggungjawaban publik. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bangkalan. Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dinas Lingkungan Hidup telah menerapkan akuntansi manajemen lingkungan, namun pencatatannya masih manual dan tidak memisahkan biaya lingkungan dari biaya operasional umum. Kondisi ini menyulitkan evaluasi biaya dan penilaian dampak program. Pengelolaan program kerja telah terstruktur dan dievaluasi rutin, tetapi pengukuran kinerja masih berfokus pada output, bukan dampak lingkungan jangka panjang. Transparansi informasi juga masih terbatas pada publikasi kegiatan. Secara keseluruhan, penerapan akuntansi lingkungan berada pada tahap dasar dan belum sepenuhnya terintegrasi dalam proses perencanaan dan evaluasi program kerja. Temuan penelitian ini memberikan implikasi secara teoritis dan praktis berupa penguatan pemahaman tentang peran akuntansi manajemen lingkungan serta kebutuhan perbaikan sistem pencatatan dan evaluasi program kerja di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bangkalan.

Kata kunci: Akuntansi Manajemen Lingkungan, Pengelolaan Program Kerja, Kinerja Lingkungan, Transparansi, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bangkalan

Received: November 24, 2025; Revised: November 29, 2025; Accepted: December 05, 2025;

Published: April 30, 2026

*Corresponding author, e-mail address

1. LATAR BELAKANG

Pembangunan ekonomi di Kabupaten Bangkalan memberi dampak positif terhadap pertumbuhan daerah, namun juga menimbulkan persoalan lingkungan yang semakin kompleks. Peningkatan aktivitas industri, jumlah penduduk, dan konsumsi masyarakat menyebabkan volume sampah terus bertambah setiap tahun, sementara sarana dan prasarana pengelolaan masih terbatas. Kondisi tersebut menimbulkan tekanan terhadap kapasitas pengelolaan lingkungan daerah dan menuntut adanya sistem informasi yang mampu mendukung perencanaan serta pengambilan keputusan yang akuntabel. Akuntansi manajemen lingkungan memiliki peran penting dalam mengidentifikasi, mengukur, dan melaporkan biaya lingkungan sehingga dapat menjadi dasar evaluasi kebijakan dan peningkatan efektivitas program (Saraswati & Musmini, 2024).

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bangkalan merupakan institusi yang berperan penting dalam menjaga kualitas lingkungan melalui program pengelolaan sampah, pengendalian pencemaran, penghijauan, edukasi masyarakat, hingga penguatan regulasi daerah. Namun, keterbatasan armada dan rendahnya partisipasi masyarakat menyebabkan banyak program tidak berjalan optimal. (Wahyuni et al., 2024) menyatakan bahwa penerapan akuntansi manajemen lingkungan dan inovasi hijau dapat membantu organisasi meningkatkan kinerja sekaligus mengurangi dampak lingkungan. Dengan demikian, penerapan konsep tersebut penting untuk dievaluasi pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bangkalan.

Akuntansi manajemen lingkungan berfungsi sebagai sistem informasi untuk mengidentifikasi, mengukur dan melaporkan biaya lingkungan agar dapat digunakan dalam pengambilan keputusan manajerial. (Maysaroh & Murwaningsari, 2023) menemukan bahwa akuntansi manajemen lingkungan dan pengungkapan lingkungan berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan, terutama ketika dimoderasi oleh media exposure. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa penerapan akuntansi lingkungan tidak hanya berdampak pada efisiensi biaya, tetapi juga meningkatkan akuntabilitas organisasi. Hal ini menunjukkan perlunya evaluasi menyeluruh agar penerapan akuntansi manajemen lingkungan dapat lebih efektif dalam mencapai tujuan keberlanjutan. Berikut adalah data pengelolaan program kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bangkalan tahun 2022 – 2025:

Tabel 1. Program Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bangkalan

| Tahun | Bidang Program | Capaian Program | Kendala Utama |
|--------------|---|--|---|
| 2022 | Sampah, Pencemaran, Penghijauan, Edukasi, Regulasi | 105 ton sampah/hari, 2.000 pohon, 10 sosialisasi, regulasi lingkungan | Armada terbatas, partisipasi rendah, TPA overload |
| 2023 | Sampah, Pencemaran, Penghijauan, Edukasi, Regulasi | 117 ton sampah/hari, 1.800 pohon, 12 sosialisasi, dokumen kebijakan | Armada rusak, SDM terbatas, dukungan minim |
| 2024 | Sampah, Pencemaran, Penghijauan, Edukasi, Regulasi | 120 ton sampah/hari, 2.200 pohon, 15 sosialisasi, revisi regulasi | TPA hampir penuh, sarana terbatas, partisipasi rendah |
| 2025 | Sampah, Pencemaran, Penghijauan, Edukasi, Regulasi | Target daur ulang, 2.500 pohon, 20 sosialisasi, regulasi ketat | Minim pemilahan, koordinasi lemah, SDM kurang |

Sumber: data primer

Berdasarkan tabel data program kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bangkalan menunjukkan bahwa pada tahun 2022 volume sampah yang diangkut mencapai rata-rata 105 ton per hari, meningkat menjadi 117 ton per hari pada 2023. Peningkatan ini tidak diimbangi dengan penambahan fasilitas dan rendahnya tingkat kepatuhan masyarakat dalam memilah sampah. (Erdiana & Suryandari, 2020) menjelaskan bahwa akuntansi manajemen lingkungan berperan dalam membantu organisasi memahami biaya lingkungan yang timbul, sehingga dapat memperbaiki strategi pengelolaan. Hal ini memperlihatkan adanya kesenjangan antara target program Dinas Lingkungan Hidup dengan capaian di lapangan.

Penelitian terdahulu banyak berfokus pada sektor swasta, khususnya manufaktur dan industri. (Kasmawati et al., 2021) misalnya, menemukan bahwa implementasi akuntansi manajemen lingkungan di Kawasan Industri Makassar masih sangat minim karena perusahaan belum menganggap biaya lingkungan sebagai informasi penting dalam pengambilan keputusan. Kondisi ini menunjukkan bahwa perhatian terhadap akuntansi lingkungan dalam sektor swasta masih berfokus pada aspek finansial semata. Hal ini berbeda dengan sektor publik yang memiliki tanggung jawab langsung terhadap masyarakat. Karena itu, penelitian tentang penerapan akuntansi manajemen lingkungan pada lembaga pemerintah daerah masih terbatas dan perlu ditingkatkan.

Penelitian terdahulu cenderung menitikberatkan pada hubungan akuntansi lingkungan dengan kinerja finansial perusahaan. Fokus ini membuat penerapan konsep akuntansi lingkungan dalam instansi pemerintah kurang mendapat perhatian, padahal penerapan konsep ini dalam konteks instansi pemerintah bisa lebih menekankan pada aspek akuntabilitas pelayanan publik. Menurut (Saraswati & Musmini, 2024), hambatan terbesar dalam penerapan akuntansi lingkungan pada instansi adalah keterbatasan sumber daya manusia yang memahami konsep ini. Kondisi tersebut mengakibatkan penerapan akuntansi manajemen lingkungan belum berjalan optimal dan cenderung menghadapi berbagai kendala teknis. Maka, evaluasi penerapan akuntansi manajemen lingkungan di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bangkalan akan mampu memberikan gambaran yang lebih nyata tentang kendala dan peluangnya.

Penelitian ini adalah fokusnya pada instansi pemerintah daerah, bukan sektor swasta. Penelitian terdahulu seperti yang dilakukan di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nganjuk tahun 2022 menunjukkan bahwa akuntansi manajemen lingkungan dan inovasi hijau dapat digunakan untuk mengevaluasi kinerja lingkungan oleh (Krisistiya et al., 2023). Hasil tersebut membuktikan bahwa pendekatan akuntansi lingkungan dapat dijadikan alat untuk menilai efektivitas program sekaligus meningkatkan kualitas pengelolaan lingkungan di tingkat daerah. Namun, kajian serupa di Bangkalan belum banyak dilakukan. Oleh sebab itu, penelitian ini menawarkan perspektif baru mengenai penerapan akuntansi manajemen lingkungan dalam konteks program kerja pemerintah daerah.

Penelitian ini, diharapkan dapat memberikan kontribusi praktis berupa rekomendasi strategis untuk meningkatkan efektivitas program kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bangkalan. Hal tersebut sangat penting karena dapat membantu instansi dalam menemukan solusi yang tepat atas berbagai kendala yang dihadapi, baik dari segi keterbatasan sumber daya, kurangnya partisipasi masyarakat, maupun lemahnya koordinasi antar bidang. Temuan juga diharapkan memperkaya literatur akademik mengenai akuntansi manajemen lingkungan di sektor publik. (Maysaroh & Murwaningsari, 2023) menegaskan bahwa integrasi akuntansi lingkungan dalam sistem manajemen dapat memperbaiki perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi program. Oleh karena itu, penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat baik secara teoritis

maupun praktis bagi implementasi kebijakan di bidang lingkungan, khususnya dalam upaya mewujudkan pembangunan berkelanjutan.

2. KAJIAN TEORITIS

Landasan Teori

1) Akuntansi Manajemen

Menurut (M. Walther & J. Skousen, 2019), akuntansi manajemen merupakan bagian dari sistem informasi organisasi yang berfungsi untuk menyediakan data keuangan maupun non keuangan yang relevan bagi pihak internal, terutama manajer, dalam rangka perencanaan, pengendalian, pengambilan keputusan, dan evaluasi kinerja.

Menurut The American Institute of Certified Public Accountants (AICPA) yang dikutip dalam (Santoso et al., 2023), akuntansi manajemen tidak hanya sebatas pencatatan biaya, tetapi lebih luas meliputi penyediaan informasi yang dibutuhkan dalam perencanaan, pengendalian, serta evaluasi kinerja.

2) Akuntansi Manajemen Lingkungan

Akuntansi Manajemen Lingkungan merupakan cabang dari akuntansi manajemen yang berfokus pada pencatatan, pengukuran, dan pelaporan biaya lingkungan untuk mendukung fungsi perencanaan, pengendalian, dan pengambilan keputusan dalam organisasi. Menurut (Husnatarina, 2024), akuntansi manajemen lingkungan hadir karena meningkatnya tuntutan agar perusahaan dan instansi publik tidak hanya mengejar keuntungan ekonomi, tetapi juga memperhatikan dampak lingkungan dari setiap aktivitasnya.

Menurut (Taufiq & Silaturahmi, 2022), akuntansi manajemen lingkungan bertujuan mengintegrasikan sistem akuntansi yang relevan dengan aspek lingkungan, yang mencakup praktik seperti life-cycle costing, full-cost accounting, penilaian manfaat, hingga perencanaan strategis bagi pengelolaan lingkungan.

Menurut (Taufiq & Silaturahmi, 2022), penerapan akuntansi ini berperan dalam meningkatkan efektivitas serta efisiensi pemanfaatan sumber daya alam seperti energi dan air, sehingga mampu menekan biaya operasional yang timbul dari aktivitas emisi maupun pengelolaan limbah.

Menurut (Husnatarina, 2024), akuntansi manajemen lingkungan juga menjadi dasar dalam perencanaan dan pengendalian, misalnya ketika perusahaan harus memilih teknologi produksi yang ramah lingkungan, mengelola limbah, atau menggunakan energi secara lebih hemat.

3) Pengelolaan Program Kerja

Pengelolaan program kerja pada dasarnya merupakan proses sistematis yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengendalian, dan evaluasi agar tujuan organisasi dapat tercapai secara efektif dan efisien. Menurut (Watt, 2014), pengelolaan program atau proyek dibagi ke dalam komponen-komponen utama yang harus dikuasai oleh seorang manajer, mulai dari tahap start-up di mana dilakukan penyusunan infrastruktur, penetapan ruang lingkup, jadwal awal, hingga penyusunan anggaran, serta membangun kesepahaman dengan para pemangku kepentingan.

Menurut Siagian (2016), pengelolaan program kerja merupakan proses terencana yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan evaluasi untuk mencapai sasaran organisasi melalui penggunaan sumber daya secara optimal. Menurut Peraturan Menteri PANRB No. 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP), tujuan utama pengelolaan program kerja adalah untuk mewujudkan kinerja yang berorientasi pada hasil (result oriented) dengan menjamin keterkaitan antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pelaporan kinerja secara terpadu.

Menurut (Mahmudi, 2015), pengelolaan program kerja yang baik mampu meningkatkan efektivitas kinerja organisasi melalui pengaturan sumber daya yang tepat, pengendalian operasional, serta evaluasi hasil yang terukur. Hal ini sejalan dengan (Mardiasmo, 2018) yang menegaskan bahwa pengelolaan program pada instansi pemerintah merupakan instrumen untuk mencapai tujuan pembangunan, meningkatkan akuntabilitas publik, dan mendorong transparansi dalam penggunaan anggaran negara.

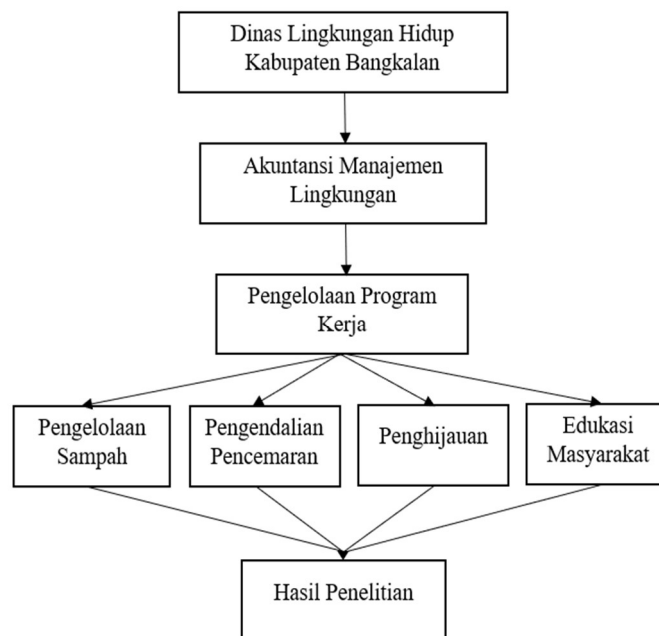
4) Program Kerja Lingkungan

Program kerja lingkungan merupakan serangkaian kegiatan yang dirancang secara sistematis untuk melindungi, memelihara serta memperbaiki kualitas lingkungan hidup. Konsep ini lahir dari kesadaran bahwa aktivitas ekonomi dan sosial memiliki dampak terhadap ekosistem, sehingga dibutuhkan perencanaan yang

terintegrasi agar pembangunan tetap berkelanjutan. Menurut (Karmagatri et al., 2023), manajemen hijau berfungsi menjembatani kepentingan bisnis dengan kelestarian lingkungan melalui penerapan inovasi, pengurangan limbah, dan tanggung jawab sosial.

(Husnatarina, 2024) menekankan bahwa efisiensi penggunaan sumber daya turut menjadi perhatian agar kegiatan operasional dapat berlangsung tanpa menguras kapasitas lingkungan secara berlebihan. Partisipasi publik merupakan fondasi keberlanjutan program karena memberikan dukungan sosial dan budaya yang kuat bagi pelaksanaan kebijakan lingkungan (Handoko, 2023).

Kerangka Berpikir



Gambar 1. Kerangka Berpikir

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus yang dilaksanakan di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bangkalan, yang beralamat di Jl. Soekarno Hatta No. 45, Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur, 69116. Dalam penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus, data perlu digali secara mendalam supaya gambaran fenomena yang diteliti benar-benar jelas. Data yang digunakan pada penelitian ini adalah data primer yang diperoleh melalui wawancara dengan pegawai Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bangkalan dan data sekunder berupa laporan tahunan dan

arsip kegiatan. Dalam penelitian ini informan yang dipilih adalah pegawai pada Dinas Lingkungan Hidup dari beberapa bidang. Informan penelitian yang dipilih, dianggap peneliti terkait langsung dengan pengelolaan lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bangkalan.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

1) Deskripsi Hasil Penelitian

Dari penelitian yang telah dilakukan, peneliti mendapatkan beberapa temuan mengenai penerapan akuntansi manajemen lingkungan dalam pengelolaan program kerja pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bangkalan melalui wawancara dan observasi. Berdasarkan proses triangulasi yang melibatkan wawancara dengan informan, diperoleh beberapa temuan penting yang akan digunakan dalam proses analisis lebih lanjut. Proses triangulasi ini bertujuan untuk memastikan keabsahan dan konsistensi data yang diperoleh, serta untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam terkait isu yang diteliti. Berikut adalah hasil triangulasi yang didapat:

a. Konsistensi Informasi

Berdasarkan wawancara dengan beberapa informan, ditemukan kesamaan pandangan mengenai pencatatan anggaran yang masih dilakukan secara manual dan digabungkan dengan biaya operasional lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa Dinas Lingkungan Hidup belum memiliki sistem yang memadai untuk memisahkan biaya operasional dari biaya yang terkait langsung dengan kegiatan lingkungan. Temuan ini sejalan dengan hasil observasi lapangan yang menunjukkan bahwa pencatatan anggaran belum dilakukan secara rinci, sehingga menghambat transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan lingkungan.

b. Perbedaan dalam Pengukuran Anggaran

Hasil triangulasi mengungkapkan walaupun semua informan sepakat bahwa anggaran untuk kegiatan lingkungan dihitung berdasarkan pencapaian kegiatan, ada perbedaan dalam cara menilai keberhasilan program. Beberapa informan lebih menekankan output langsung (misalnya, jumlah pohon yang ditanam atau volume

sampah yang dikelola), sementara informan lainnya lebih memperhatikan dampak jangka panjang, seperti penurunan polusi udara atau peningkatan kualitas lingkungan. Perbedaan ini menunjukkan bahwa ada kebutuhan untuk peningkatan pengukuran yang lebih terstruktur dan berbasis pada hasil yang lebih holistik, bukan hanya sekedar output.

c. Keterbatasan Transparansi Informasi

Hasil triangulasi mengungkapkan Meskipun Dinas Lingkungan Hidup sudah memanfaatkan media sosial (seperti Instagram) untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat dan stakeholders, temuan ini menunjukkan bahwa transparansi informasi masih terbatas. Informasi terkait hibah atau kontribusi dari pihak ketiga lebih sering disampaikan hanya kepada pihak yang terlibat langsung dalam proyek, sementara masyarakat umum hanya mendapat informasi dasar mengenai program lingkungan yang sedang berjalan. Hal ini menunjukkan adanya keterbatasan dalam transparansi yang dapat memengaruhi akuntabilitas publik.

d. Kendala Infrastruktur dan Sumber Daya

Hasil triangulasi juga mengungkapkan bahwa infrastruktur yang terbatas, seperti kekurangan TPA yang memadai, serta terbatasnya sumber daya manusia dan anggaran menjadi hambatan utama dalam pengelolaan lingkungan di Kabupaten Bangkalan. Pengelolaan sampah, misalnya, masih terbatas pada daerah perkotaan dan belum mencakup seluruh wilayah kabupaten, terutama daerah pelosok yang masih kurang terlayani. Hal ini menjadi kendala besar dalam mencapai tujuan pengelolaan lingkungan secara efektif dan merata

Triangulasi yang telah dilakukan memastikan keabsahan data, yang kemudian mengantarkan pada penyusunan hasil penelitian secara komprehensif. Berdasarkan data yang telah tervalidasi tersebut, berikut dipaparkan temuan penelitian terkait penerapan akuntansi manajemen lingkungan pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bangkalan:

Akuntansi Manajemen Lingkungan

Akuntansi manajemen lingkungan merupakan proses mengidentifikasi, mencatat semua biaya yang timbul akibat kegiatan yang berdampak pada lingkungan, seperti biaya pengolahan sampah, pengendalian polusi, pemeliharaan taman atau

ruang terbuka hijau, serta biaya yang terkait dengan pengurangan dampak negatif terhadap lingkungan. Berdasarkan hasil wawancara dengan salah seorang informan utama yakni Bapak Anang Yulianto Hari Purnomo, AP., MM selaku Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bangkalan yang menyatakan bahwa:

“Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bangkalan menyadari pentingnya penerapan akuntansi manajemen lingkungan. Namun, selama ini fokus utamanya masih lebih banyak pada pelaksanaan tugas teknis yang bersifat langsung, seperti pengelolaan sampah dan penghijauan, sehingga sistem akuntansi lingkungan yang diterapkan belum sepenuhnya memadai. Dinas juga belum memiliki pemisahan yang jelas antara biaya operasional dan biaya yang spesifik terkait dengan kegiatan lingkungan, yang tentunya akan mempengaruhi efektivitas pengelolaan keuangan untuk program-program lingkungan yang ada”. (Wawancara tanggal 07 – 13 November 2025)

Di sisi lain, salah seorang informan utama lainnya yakni Ibu Restu Angga Mahardika selaku Bendahara Sub Bagian Keuangan Dinas Lingkungan Hidup juga menegaskan bahwa:

“Akuntansi manajemen lingkungan sangat penting untuk diterapkan dan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bangkalan telah menerapkan sistem akuntansi manajemen lingkungan, akan tetapi penerapannya belum memadai. Semua pencatatan masih manual dan belum ada pemisahan yang jelas antara biaya operasional dan biaya lingkungan yang spesifik. Sejauh ini, seluruh biaya yang terkait dengan kegiatan pengelolaan lingkungan, seperti pengolahan sampah, penghijauan, serta pengendalian pencemaran, masih digabungkan dalam kategori biaya operasional umum.” (Wawancara tanggal 07 – 13 November 2025)

Kedua informan menunjukkan bahwasanya penerapan akuntansi manajemen lingkungan pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bangkalan sangat penting walaupun penerapannya belum optimal dan tentunya perlu pembenahan. Dari perspektif penelitian, dengan kondisi tidak adanya pemisahan yang jelas antara biaya untuk pengelolaan lingkungan dan biaya operasional lainnya maka hal tersebut menyulitkan dalam memantau dan mengukur sejauh mana efisiensi dan dampak dari program-program lingkungan yang sedang dijalankan. Di sisi lain Dinas Lingkungan Hidup juga akan kesulitan untuk melakukan evaluasi yang lebih mendalam mengenai penggunaan anggaran dan pencapaian program-program yang sudah dilaksanakan.

Pengungkapan Informasi kepada Stakeholders

Pengungkapan informasi kepada stakeholders merupakan upaya untuk menyampaikan data atau informasi penting terkait kegiatan ataupun kebijakan yang diterapkan oleh suatu instansi, proses ini melibatkan berbagai media untuk

memastikan pihak yang berkepentingan, baik masyarakat, pemerintah, maupun sektor lain dapat memperoleh informasi yang jelas tentang program-program yang dijalankan. Berdasarkan hasil wawancara dengan informan 1 yang didukung dengan penguatan oleh informan pendukung lainnya yang menyatakan bahwa:

“Informasi terkait kegiatan lingkungan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bangkalan disebarkan melalui media sosial, khususnya Instagram kepada stakeholders. Namun, informasi yang lebih spesifik, seperti hibah dan kontribusi terkait proyek, hanya disampaikan kepada pihak yang terlibat langsung. Hal ini menunjukkan bahwa komunikasi dengan masyarakat dan stakeholders sudah dilakukan melalui platform digital, namun masih terdapat batasan dalam menyampaikan informasi yang lebih mendalam, terutama yang terkait dengan hibah atau bantuan tertentu.” (Wawancara tanggal 07 – 13 November 2025)

Informan utama dan informan pendukung menyatakan bahwa Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bangkalan telah berupaya menyampaikan data atau informasi terkait kegiatan ataupun kebijakan yang diterapkan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bangkalan kepada stakeholders melalui platform digital. Penyampaian informasi tersebut dilakukan untuk memastikan para stakeholders dapat mengakses informasi yang jelas dan lengkap mengenai program dan kebijakan yang dijalankan.

Pengelolaan Program Kerja Lingkungan

Pengelolaan program kerja lingkungan adalah proses merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi kegiatan yang bertujuan untuk menjaga dan memperbaiki kondisi lingkungan. Pengelolaan program kerja pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bangkalan ini telah direncanakan dengan matang yang pelaksanaannya akan sesuai dengan periode yang telah dijadwalkan. Berdasarkan hasil wawancara dengan informan 1 yang didukung dengan penguatan oleh informan pendukung lainnya yang menyatakan bahwa:

“Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bangkalan mengelola program kerja lingkungan dengan perencanaan yang jelas dan terstruktur, di mana setiap program dibagi dalam periode triwulan dan semester. Hal ini memungkinkan evaluasi rutin dilakukan untuk memastikan pencapaian program berjalan sesuai dengan rencana yang ditetapkan. Setiap bidang di Dinas Lingkungan Hidup, baik itu pengelolaan sampah, penghijauan, maupun pengendalian pencemaran, memiliki jadwal dan anggaran yang terperinci, yang memungkinkan pengelolaan waktu dan sumber daya dilakukan dengan efisien.” (Wawancara tanggal 07 – 13 November 2025)

Semua informan sepakat menyatakan bahwasanya pengelolaan program kerja lingkungan di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bangkalan sudah dilakukan

dengan perencanaan yang matang dan terperinci. Program yang ada telah dibagi dalam periode tertentu, adanya pembagian waktu dan anggaran yang jelas setiap kegiatan dapat dijalankan dengan lebih efisien. Evaluasi rutin juga menjadi kunci yang memastikan bahwa setiap program kerja dapat berjalan sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

Pengukuran Kinerja Lingkungan

Pengukuran kinerja lingkungan merupakan proses untuk menilai sejauh mana suatu program atau kebijakan berhasil mencapai tujuan yang telah ditetapkan, khususnya dalam menjaga dan meningkatkan kualitas lingkungan. Proses ini melibatkan penggunaan indikator yang jelas dan dapat diukur untuk mengevaluasi hasil dari berbagai kegiatan lingkungan. Berdasarkan wawancara dengan informan utama dan informan lainnya terutama bidang persampahan, menyatakan bahwa:

“Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bangkalan mengukur kinerja lingkungan berdasarkan pencapaian kegiatan di setiap bidang, seperti jumlah pohon yang ditanam, jumlah sampah yang dikelola, serta penurunan tingkat pencemaran udara dan air. Kepuasan masyarakat juga menjadi indikator penting dalam menilai keberhasilan program, di mana apabila tidak ada keluhan dari masyarakat di media sosial atau melalui saluran lain, maka program tersebut dianggap berhasil. Hal ini menunjukkan bahwa pengukuran kinerja di Dinas Lingkungan Hidup masih terfokus pada hasil yang terukur secara langsung dari program-program yang dilaksanakan dan feedback atau saran masukan dari masyarakat.” (Wawancara tanggal 07 – 13 November 2025)

Pernyataan informan utama yang dikuatkan dengan informan pendukung lainnya terutama dari bidang persampahan sepakat menyatakan bahwa pengukuran kinerja lingkungan diukur melalui beberapa indikator, salah satunya pencapaian program dan kepuasan masyarakat. Menurut para informan pengukuran kinerja lingkungan di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bangkalan masih dalam tahap perkembangan dan perlu ditingkatkan, baik dalam hal pemilihan indikator yang lebih beragam maupun dalam hal evaluasi dampak jangka panjang dari setiap kegiatan yang dilakukan.

2) Pembahasan Hasil Temuan Penelitian

Seluruh temuan yang diperoleh melalui wawancara, observasi dan dokumentasi diolah dan diinterpretasikan dengan mengacu pada konsep akuntansi manajemen lingkungan dan prinsip pengelolaan kinerja di sektor publik, sehingga pembahasan

tidak hanya menggambarkan kondisi empiris, tetapi juga memberikan makna terhadap temuan yang ada.

Evaluasi Penerapan Akuntansi Manajemen Lingkungan pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bangkalan

Berdasarkan hasil penelitian, penerapan akuntansi manajemen lingkungan pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bangkalan dapat dinilai belum memadai. Pencatatan anggaran dan pengeluaran yang berkaitan dengan kegiatan lingkungan masih dilakukan secara manual dan digabung dalam kelompok biaya operasional umum, sehingga pencatatan anggaran dan pengeluaran pengelolaan sampah, penghijauan, pengendalian pencemaran dan pemeliharaan ruang terbuka hijau belum tampak secara terpisah sebagai biaya lingkungan yang spesifik. Kepala Dinas dan bendahara sub bagian keuangan memang menyatakan bahwa akuntansi manajemen lingkungan penting untuk mendukung pengelolaan program-program lingkungan. Namun, pengakuan ini belum diikuti oleh pembenahan nyata pada sistem pencatatan dan pelaporan biaya.

Dalam perspektif teori akuntansi manajemen lingkungan, seharusnya organisasi tidak hanya mencatat biaya secara umum, tetapi juga mengidentifikasi, mengukur dan mengelompokkan biaya lingkungan sehingga dapat diketahui berapa besar sumber daya yang dikorbankan untuk mengurangi dampak lingkungan, mengelola sampah, atau meningkatkan kualitas lingkungan. Kondisi ini menunjukkan bahwa Dinas baru berada pada tahap kesadaran konseptual, sementara praktik yang ideal yaitu identifikasi, pengukuran dan pelaporan biaya lingkungan secara rinci dan transparan belum terwujud. Akibatnya, informasi biaya yang tersedia belum dapat digunakan secara optimal untuk menilai efisiensi dan efektivitas program lingkungan yang dijalankan. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa praktik di Dinas Lingkungan Hidup belum sejalan dengan ideal teori tersebut. Ketiadaan pemisahan biaya lingkungan mengakibatkan sulitnya dilakukan analisis biaya per program atau per kegiatan sehingga evaluasi efisiensi biaya belum dapat dilakukan secara memadai. Dengan demikian, evaluasi terhadap penerapan akuntansi manajemen lingkungan pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bangkalan menempatkannya pada posisi yang masih awal. Dari sisi kesadaran, terdapat pengakuan akan pentingnya akuntansi manajemen lingkungan, tetapi dari sisi sistem dan praktik, belum terdapat mekanisme

pencatatan, klasifikasi, dan pelaporan biaya lingkungan yang sesuai dengan konsep akuntansi manajemen lingkungan yang diharapkan.

Evaluasi Pengelolaan Program Kerja pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bangkalan

Jika ditinjau dari aspek pengelolaan program kerja, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bangkalan pada dasarnya telah memiliki struktur manajerial yang cukup baik. Program kerja disusun dalam rencana tahunan yang kemudian dipecah menjadi periode triwulan dan semester, dengan pembagian tugas yang jelas di setiap bidang. Pelaksanaan program dipantau dan dievaluasi secara berkala, baik melalui evaluasi harian untuk kegiatan operasional rutin, maupun evaluasi bulanan, triwulanan, dan tahunan untuk menilai capaian secara keseluruhan. Hal ini menunjukkan bahwa fungsi perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan telah dijalankan secara sistematis. Namun, di balik struktur pengelolaan program yang tampak terencana, penelitian ini juga menemukan adanya berbagai kendala yang mempengaruhi efektivitas pengelolaan program kerja, antara lain keterbatasan infrastruktur seperti ketiadaan tempat pembuangan akhir yang memadai dan cakupan layanan sampah yang belum menjangkau seluruh wilayah, keterbatasan sumber daya manusia dan anggaran, serta rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pengelolaan lingkungan.

Dalam kajian manajemen publik, pengelolaan program yang baik tidak hanya ditentukan oleh struktur dan jadwal, tetapi juga oleh kecukupan sumber daya, dukungan infrastruktur, dan partisipasi para pemangku kepentingan. Temuan penelitian menunjukkan bahwa Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bangkalan telah memenuhi aspek perencanaan dan pengorganisasian program, namun masih menghadapi tantangan besar dari sisi dukungan sumber daya dan perilaku masyarakat. Oleh karena itu, pengelolaan program kerja Dinas dapat dinilai sudah cukup baik dari sisi struktur manajerial, tetapi membutuhkan penguatan lebih lanjut agar tujuan lingkungan yang ditetapkan dapat tercapai secara lebih optimal dan merata di seluruh wilayah kabupaten.

Evaluasi Penerapan Akuntansi Manajemen Lingkungan dalam Pengelolaan Program Kerja pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bangkalan

Keterkaitan antara akuntansi manajemen lingkungan dan pengelolaan program kerja, tampak masih lemah dan belum terbangun secara sistematis. Di satu sisi,

program kerja telah direncanakan, dilaksanakan dan dievaluasi dengan mengacu pada jadwal dan target output, seperti jumlah sampah yang dikelola, jumlah pohon yang ditanam, data penurunan pencemaran, serta minimnya keluhan masyarakat. Namun di sisi lain, sistem akuntansi yang digunakan belum mampu menyajikan informasi biaya lingkungan yang terpisah untuk setiap kegiatan atau program. Akibatnya, evaluasi program lebih banyak berfokus pada keterlaksanaan kegiatan dan pencapaian output fisik, sedangkan analisis biaya dan manfaat lingkungan belum dapat dilakukan secara komprehensif. Padahal, menurut konsep akuntansi manajemen lingkungan, informasi biaya lingkungan seharusnya terintegrasi dengan siklus pengelolaan program, mulai dari perencanaan hingga evaluasi, sehingga manajemen dapat menilai apakah sumber daya yang dikorbankan sebanding dengan hasil dan dampak yang dicapai.

Hasil temuan penelitian ini menunjukkan bahwa Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bangkalan telah memiliki fondasi pengelolaan program kerja lingkungan yang cukup baik dari sisi struktur, perencanaan dan evaluasi kinerja berbasis output, serta telah mulai membuka diri terhadap transparansi informasi melalui media digital. Dalam konteks teori, akuntansi manajemen lingkungan seharusnya menjadi bagian yang terintegrasi dengan siklus pengelolaan program, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, sampai evaluasi. Informasi biaya lingkungan yang lengkap dan akurat dapat membantu manajemen menentukan prioritas program, mengevaluasi apakah penggunaan anggaran sebanding dengan hasil yang dicapai, serta memperbaiki program di masa mendatang. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bangkalan, peran akuntansi manajemen lingkungan dalam siklus tersebut belum berjalan optimal. Data biaya yang ada masih bersifat agregat dan administratif, sehingga belum dimanfaatkan sebagai dasar analisis manajerial.

Kondisi ini juga berdampak pada kemampuan Dinas untuk melakukan evaluasi yang lebih mendalam terhadap program kerja. Evaluasi yang ada saat ini lebih menekankan pada aspek keterlaksanaan kegiatan dan pencapaian target fisik, sedangkan evaluasi berbasis biaya dan manfaat belum dapat dilakukan secara komprehensif. Misalnya, Dinas dapat mengetahui berapa banyak sampah yang berhasil dikelola atau berapa banyak pohon yang ditanam, tetapi belum dapat

menghitung secara rinci berapa biaya per satuan sampah yang dikelola atau biaya per pohon yang ditanam, bahkan belum sampai pada perhitungan nilai ekonomi dari penurunan pencemaran atau peningkatan kualitas lingkungan yang dihasilkan.

Dengan demikian, evaluasi penerapan akuntansi manajemen lingkungan dalam pengelolaan program kerja pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bangkalan menunjukkan bahwa akuntansi manajemen lingkungan belum sepenuhnya berfungsi sebagai alat pendukung pengambilan keputusan program. Akuntansi masih lebih banyak berperan sebagai alat administrasi anggaran dan pertanggungjawaban belanja, belum berkembang menjadi sistem informasi manajerial yang dapat menghubungkan antara biaya, output, dan dampak program lingkungan. Hal ini menjadi catatan penting bagi upaya perbaikan ke depan, bahwa penguatan akuntansi manajemen lingkungan tidak hanya diperlukan pada level teknis pencatatan, tetapi juga pada integrasinya dengan seluruh siklus pengelolaan program kerja lingkungan, sehingga dapat mendukung pengelolaan lingkungan yang lebih efektif, efisien, dan akuntabel.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Evaluasi Penerapan Akuntansi Manajemen Lingkungan dalam Pengelolaan Program Kerja pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bangkalan, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut.

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bangkalan pada dasarnya telah menyadari pentingnya akuntansi manajemen lingkungan dan mulai menerapkannya, namun pelaksanaannya masih belum optimal. Seluruh biaya yang berkaitan dengan kegiatan lingkungan, seperti pengelolaan sampah, penghijauan, dan pengendalian pencemaran, masih dicatat secara manual dan digabung dalam pos biaya operasional umum tanpa pemisahan yang jelas. Kondisi ini mengakibatkan informasi biaya lingkungan menjadi kurang rinci sehingga menyulitkan dinas dalam menilai efisiensi, efektivitas, serta dampak dari program lingkungan yang dijalankan.

Di sisi lain, pengelolaan program kerja lingkungan di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bangkalan sudah tersusun dengan cukup baik. Program disusun berdasarkan periode triwulan dan semester, dengan pembagian jadwal dan anggaran per bidang yang jelas, serta adanya evaluasi rutin terhadap pelaksanaan program. Selain itu, Dinas juga

telah berupaya melakukan pengungkapan informasi melalui media sosial, khususnya Instagram untuk menyampaikan kegiatan lingkungan kepada masyarakat dan stakeholders. Namun, informasi yang berkaitan dengan pendanaan, seperti hibah dan kontribusi pihak ketiga, belum dibuka secara luas dan cenderung hanya diketahui pihak tertentu, sehingga transparansi yang terbentuk masih sebatas pada informasi kegiatan, belum sampai pada aspek pertanggungjawaban anggaran.

Pengukuran kinerja lingkungan yang dilakukan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bangkalan masih berfokus pada indikator output, seperti jumlah pohon yang ditanam, jumlah sampah yang dikelola, penurunan pencemaran, dan kepuasan masyarakat yang salah satunya diukur dari ada atau tidaknya keluhan. Meskipun indikator tersebut memberikan gambaran awal capaian program, pengukuran ini belum sepenuhnya mencerminkan dampak jangka panjang terhadap kualitas lingkungan. Tidak adanya pemisahan biaya lingkungan juga membuat hubungan antara besarnya anggaran yang dikeluarkan dengan hasil yang diperoleh sulit dianalisis secara lebih mendalam. Secara keseluruhan, kondisi ini menunjukkan bahwa Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bangkalan berada pada tahap compliance, yakni sudah mengarah pada penerapan prinsip akuntansi manajemen lingkungan dan tata kelola yang baik, namun akuntansi lingkungan belum sepenuhnya terintegrasi dalam proses perencanaan, pengambilan keputusan dan evaluasi program kerja lingkungan.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang diperoleh, terdapat beberapa saran yang dapat diberikan agar dapat menjadi masukan bagi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bangkalan, pemerintah daerah dan penleiti selanjutnya.

1) Bagi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bangkalan

Dinas perlu mulai membangun sistem pencatatan biaya lingkungan yang lebih rapi dan terpisah dari biaya operasional umum agar informasi anggaran lebih jelas dan mudah dievaluasi. Transparansi informasi juga dapat ditingkatkan dengan tidak hanya menampilkan kegiatan di media sosial, tetapi juga membuka data terkait pendanaan program lingkungan. Selain itu, indikator kinerja lingkungan dapat diperluas ke arah penilaian dampak, bukan hanya jumlah kegiatan. Koordinasi antar bidang juga perlu diperkuat agar perencanaan dan pelaksanaan program berjalan lebih menyeluruh.

2) Bagi pemerintah daerah

Hasil penelitian ini dapat dijadikan pertimbangan untuk memperkuat kapasitas Dinas Lingkungan Hidup, baik dari sisi anggaran, sarana prasarana, maupun sumber daya manusia. Dukungan yang memadai dari pemerintah daerah akan sangat membantu Dinas dalam menerapkan akuntansi manajemen lingkungan secara lebih optimal serta meningkatkan efektivitas program lingkungan yang dijalankan, terutama di tengah meningkatnya tantangan pengelolaan sampah dan pelestarian lingkungan di Kabupaten Bangkalan.

3) Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini masih terbatas pada satu instansi dan fokus pada aspek akuntansi manajemen lingkungan serta pengelolaan program kerja berdasarkan wawancara dan observasi dalam periode tertentu. Oleh karena itu, peneliti selanjutnya dapat memperluas ruang lingkup penelitian dengan melibatkan lebih banyak instansi pemerintah daerah atau membandingkan antar daerah untuk melihat variasi praktik akuntansi lingkungan.

DAFTAR REFERENSI

- Erdiana, I. D. M., & Suryandari, N. N. A. (2020). Perspektif Akuntansi Manajemen Lingkungan Dan Pengungkapannya Pada Nilai Perusahaan. *Jurnal Akuntansi Dan Auditing*, 17(1), 80–89.
- Husnatarina, F. (2024). *Pengantar Akuntansi Lingkungan*.
- Karmagatri, M., Riswanto, A., Asih, H. M., & Faishal, M. (2023). *Manajemen Hijau: Teori dan Konsep*.
- Kasmawati, K., Wulandari, F., Ahmad, S., & Bahri, S. (2021). Implementasi Akuntansi Manajemen Lingkungan Pada perusahaan-Perusahaan di PT. Kawasan Industri Makassar (Kima). *Kunuz: Journal of Islamic Banking and Finance*, 1(2), 85–94. <https://doi.org/10.30984/kunuz.v1i2.118>
- Krisistiya, G. R., Kusuma, M., & Suaidah, I. (2023). Analisis Penerapan Akuntansi Manajemen Lingkungan Dan Inovasi Hijau Guna Mengevaluasi Kinerja Lingkungan. *Jurnal Rimba : Riset Ilmu Manajemen Bisnis Dan Akuntansi*, 2(1), 225–237. <https://doi.org/10.61132/rimba.v2i1.559>
- M. Walther, L., & J. Skousen, C. (2019). Managerial and Cost Accounting. In *Financial Planning and Management in Public Organizations*. <https://doi.org/10.4324/9781482270938-11>
- Mahmudi. (2015). *Manajemen Kinerja Sektor Publik - Edisi Ketiga* (pp. 1–241). Unit Penerbit dan Percetakan STIM YKPN. <https://www.document.com/598124002/Manajemen-Kinerja-Sektor-Publik->

- Mahmudi?utm_source
- Mardiasmo. (2018). *Akuntansi sektor publik*. 1–87. https://play.google.com/store/books/details/Akuntansi_Sektor_Publik_Edisi_Terbaru?hl=id&id=pBVCEAAAQBAJ&utm_source
- Maysaroh, U., & Murwaningsari, E. (2023). Pengaruh Akuntansi Manajemen Lingkungan Dan Pengungkapan Lingkungan Terhadap Kinerja Keuangan Dengan Media Exposure Sebagai Variabel Moderasi. *Jurnal Ekonomi Trisakti*, 3(2), 2901–2918. <https://doi.org/10.25105/jet.v3i2.17897>
- Santoso, A., Putri, A. K., Pratiwi, L., Purwanti, A., Ervina, N., Damayanti, Betriana, M., Putri, G. A., Wahyuningsih, P., Riyadi, R., Harni, R., Novyarni, N., Kurniasih, N., Siska NY, A., Susandini, A., & Indriany, Y. (2023). Akuntansi Manajemen Penulis: In *Jejak Pustaka* (Issue 1).
- Saraswati, A. A. A. N. P., & Musmini, L. S. (2024). Analisis Penerapan Akuntansi Lingkungan Terhadap Pengelolaan Limbah Sebagai Bentuk Pertanggungjawaban Sosial Pada Puskesmas Kubutambahan I. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Humanika*, 14(2), 179–189. <https://doi.org/10.23887/jiah.v14i2.78366>
- Taufiq, A. R., & Silaturahmi, G. (2022). *Buku Ajar Akuntansi Lingkungan Dan Sosial*. www.kwu.unipma.ac.id
- Wahyuni, E. D., Leniwati, D., & Salsabila, N. (2024). Akuntansi Manajemen Lingkungan, Inovasi Hijau, dan Dampaknya Terhadap Kinerja Manajerial. *Jurnal Reviu Akuntansi Dan Keuangan*, 14(2), 429–441. <https://doi.org/10.22219/jrak.v14i2.32141>
- Watt, A. (2014). Project Management 2nd edition. In *BCcampus* (Vols. 24-MAY). <https://opentextbc.ca/projectmanagement/>.